



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Desa secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persad
- Agustian, A. (2013). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan*. [http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity\\_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2014/08/JURNAL25.pdf](http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2014/08/JURNAL25.pdf)
- Alvizar. (2015). *Tinjauan Terhadap UU Desa No.6 Tahun 2014 di Desa Parit BaruKec. Tambang Kab. Kampar (Peran BPD dalam Menanmpung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Aviandri. (2015). *Peranan BPD dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
- Berry, D. (2003). *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- BPD, (2017). *Frofil Kabupaten tentang Jumlah Kabupaten dan Jumlah Desa*. Badan Permusyawaratan Daerah Kabupaten Kuansing
- BPD, (2017). *Frofil Desa tentang Pembangunan*. Badan Permusyawaratan Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean
- Haryani. (2015). *Peran BPD dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbanugan Kabupaten Serdang Berbagai*. Universitas Medan Area
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.43 Tahun 2014, *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016, *Tentang Badan Permusyawaratan Desa*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saputra, G. (2014). *Sejarah Perkembangan Desa Sesuai Peraturan Perundangan Undangan Di Indonesia*. <http://galihlike9.blogspot.co.id/2014/03/sejarah-perkembangan-desa-sesuai.html>

Setyawan, H. (2009). *Peran BPD dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Kendal Pyak Kec. Pakisaji Kab. Malang*

Singarimbun dan Efendi. (2006). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia

Soekanto, S. (2009). *Teori Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers Jakarta

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

\_\_\_\_\_. (2004). *Metode Penelitian Desa*. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada

Suprihatini, A. (2007). *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih

Taufik, A. (2012). *Kedudukan dan peran BPD dalam Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Karangkiring Kec. Kebomas Kab. Gresik)*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa

Wahab, S. (2014). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara

Walukow, S. (2016). *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan*

## *Fungsi Pengawasan.*

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=433023&val=5797&title=PERANAN%20BADAN%20PERMUSYAWARATAN%20DESA%20DALAM%20PELAKSANAAN%20%20FUNGSI%20PENGAWASAN%20%20%28Suatu%20Studi%20Di%20Desa%20Kauneran%20Kecamatan%20Sonder%20Kabupaten%20Minahasa%29>

Widjaja, H. (2005). *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

\_\_\_\_\_. (2008). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta:  
- Raja Grafindo Persada